

Pemberdayaan Sosial Ekonomi melalui Strategi Sinkronisasi Data Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Hulawa

Indrawaty N. Bakari¹, Isti Retno Liputo², Akristianto Ahmad³, Dwiky Agustiar Alaina⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Bina Taurna Gorontalo

Jl. Jaksa Agung Suprpto Kota Gorontalo, Indonesia

e-mail: ¹indrawatybakari12345@gmail.com, ²Istiliputo87@gmail.com,

³akris.ahmad@gmail.com, ⁴dickyalaina96@gmail.com

Abstrak/Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan sosial ekonomi melalui strategi sinkronisasi data kemiskinan berbasis partisipasi warga. Metode yang digunakan meliputi pemetaan masalah, sosialisasi dan edukasi, pelatihan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa (SILADES), pendampingan verifikasi lapangan, serta monitoring dan evaluasi lintas sektor. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola data secara digital, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses verifikasi, serta perbaikan signifikan pada validitas data penerima bantuan. Sinkronisasi data juga mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dukcapil, sehingga keterpaduan data semakin kuat. Dampak sosial yang muncul berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena proses pendataan dilakukan secara terbuka. Kelebihan kegiatan ini adalah terbangunnya sistem tata kelola data yang lebih akurat dan partisipatif, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi data kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat efektivitas program bantuan sosial, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Model yang diterapkan di Desa Hulawa berpotensi untuk direplikasi ke desa-desa lain sebagai strategi pembangunan inklusif berbasis data.

Kata kunci: Kemiskinan, Sinkronisasi Data, Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, Desa Hulawa

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi tantangan pembangunan yang serius di Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, persoalan kesenjangan dan ketidakmerataan kesejahteraan tetap muncul di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang disalurkan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran. Ketika distribusi bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, maka efektivitas kebijakan akan berkurang. Persoalan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi data yang digunakan sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program. Data kemiskinan yang tidak mutakhir, tumpang tindih, atau tidak valid berakibat pada munculnya ketidaktepatan penerima bantuan, di mana kelompok rentan kerap tidak tercatat, sementara kelompok yang sudah relatif sejahtera masih menikmati program bantuan (BPS, 2023).

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang mencerminkan kompleksitas persoalan kemiskinan ini. Berdasarkan laporan BPS terbaru, angka kemiskinan di Gorontalo pada September 2024 tercatat sebesar 13,87% atau sekitar 170.030 jiwa, menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 14,57% pada Maret 2024 (BPS, 2025). Penurunan ini tentu menjadi capaian positif, namun secara umum tingkat kemiskinan Gorontalo masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi

lain di Sulawesi. Lebih jauh, terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin tercatat sekitar 4,99%, sementara di perdesaan mencapai 21,62%. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan (Pemprov Gorontalo, 2024).

Ketimpangan geografis tersebut juga dipertegas dengan fakta bahwa beberapa kabupaten menjadi penyumbang utama angka kemiskinan di Gorontalo. Kabupaten Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Kabupaten mencatat persentase penduduk miskin tertinggi, dengan angka berkisar antara 16% hingga 18% (BPS, 2024). Situasi ini memperlihatkan adanya konsentrasi kerentanan pada wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Tanpa adanya intervensi berbasis data yang terarah, program penanggulangan kemiskinan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan.

Dalam konteks ini, sinkronisasi data kemiskinan menjadi isu kunci. Data kemiskinan di Indonesia dikelola melalui beberapa sistem, yang paling dikenal adalah *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (DTKS) yang digunakan Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, DTKS memiliki keterbatasan karena belum terintegrasi sepenuhnya dengan data kependudukan serta seringkali tidak diperbarui secara rutin. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pusat Statistik memperkenalkan *Registrasi Sosial Ekonomi* (Regsosek) yang lebih komprehensif dan diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang kondisi sosial ekonomi penduduk. Kendati demikian, masalah baru muncul karena kedua sistem data ini berjalan secara paralel dan belum sepenuhnya sinkron, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih maupun kekosongan data (Kementerian Sosial RI, 2023).

Masalah data tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) dan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah* (RKPD), seringkali tidak sinkron dengan dokumen sektoral, misalnya *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah* (SPKD). Perbedaan nomenklatur, indikator, dan alokasi anggaran menyebabkan lemahnya konsistensi kebijakan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan program yang tidak optimal. Menurut UNDP Indonesia (2022), integrasi data dalam dokumen perencanaan pembangunan merupakan prasyarat penting agar kebijakan sosial dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hulawa, Kabupaten Gorontalo, hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dalam menjawab permasalahan ini. Desa Hulawa dipilih karena masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi serta menghadapi kendala dalam pemutakhiran data kemiskinan. Kegiatan ini berfokus pada sinkronisasi data melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Bappeda. Selain itu, pengabdian ini juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mempercepat proses validasi data kemiskinan.

Salah satu inovasi yang berhasil dicontohkan di daerah lain adalah penerapan *Sistem Informasi Desa* (SILADES) di Kabupaten Bone Bolango. Melalui SILADES, data kemiskinan dapat diperbarui secara berkala dengan pendekatan *by name* dan *by*

address, sehingga daftar penerima bantuan lebih akurat. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan aparat desa, camat, dan perangkat daerah terbukti memperkuat validitas data serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Praktik baik ini memberikan inspirasi untuk diterapkan di Desa Hulawa dengan menyesuaikan kondisi lokal yang ada (BPS, 2024).

Dari perspektif akademik, kegiatan ini berakar pada paradigma pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif menekankan pentingnya melibatkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam proses pembangunan, agar mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan. Data yang akurat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif, karena pemerintah dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (World Bank, 2022). Oleh karena itu, sinkronisasi data bukan hanya agenda teknokratis, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik. Kegiatan sinkronisasi data kemiskinan di Desa Hulawa juga sejalan dengan agenda transformasi digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Konsep *Satu Data Indonesia* yang dicanangkan sejak 2019 bertujuan menciptakan keterpaduan data lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Implementasi konsep ini di tingkat desa menjadi penting, karena desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Dengan adanya sinkronisasi berbasis digital, pemerintah desa dapat mengakses data yang mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, distribusi bantuan, dan pemantauan program secara lebih transparan (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Meski demikian, berbagai tantangan tetap harus dihadapi. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam mengelola sistem informasi digital. Banyak aparat desa yang belum familiar dengan aplikasi digital, sehingga perlu pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas. Kedua, masalah koordinasi antar-lembaga yang masih lemah, baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar-OPD. Ketiga, resistensi sosial yang muncul akibat pembaruan data, misalnya masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi kemudian dikeluarkan dari daftar karena tidak lagi memenuhi kriteria. Hal ini sering memunculkan gesekan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah jika tidak dikelola dengan baik (Suharto, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam kegiatan ini. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pendataan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Aparat desa juga harus diberikan pemahaman tentang pentingnya sinkronisasi data untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif. Dengan keterlibatan berbagai pihak, sinkronisasi data diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar penerima bantuan yang akurat, tetapi juga membangun kepercayaan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Hulawa memiliki urgensi yang tinggi. Angka kemiskinan yang masih cukup besar, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta lemahnya validasi data penerima bantuan menuntut adanya inovasi dan intervensi nyata. Sinkronisasi data kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital diyakini mampu memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Pada akhirnya, tujuan besar yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Hulawa, serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan di Desa Hulawa dirancang berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat sebagai inti strategi, sekaligus menekankan pada aspek pemberdayaan sosial ekonomi melalui sinkronisasi data kemiskinan. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya menghasilkan perbaikan data secara administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat serta memperkuat kapasitas desa dalam mengelola data kemiskinan secara berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan persiapan dan pemetaan masalah. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Hulawa, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Koordinasi bertujuan mengidentifikasi permasalahan utama terkait data kemiskinan, menelusuri perbedaan antara DTKS, Regsosek, dan data lokal desa, serta merumuskan kebutuhan intervensi yang relevan.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan penyadaran masyarakat, yang dilakukan melalui pertemuan desa, diskusi kelompok terarah, serta forum musyawarah bersama tokoh masyarakat dan kelompok penerima bantuan. Sosialisasi difokuskan pada pemahaman pentingnya data akurat sebagai dasar penyaluran program sosial dan perencanaan pembangunan, perbedaan sistem DTKS dan Regsosek, serta prinsip pendataan *by name* dan *by address*. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait ketidaksesuaian data yang mereka alami.

Tahap ketiga berupa pelatihan teknis bagi aparat desa mengenai pemanfaatan aplikasi digital dalam pengelolaan data, seperti *Sistem Informasi Desa* (SILADES). Pelatihan dilakukan secara praktik langsung dengan bimbingan tim pengabdian. Materi yang diberikan meliputi cara input data rumah tangga miskin, validasi melalui dokumen kependudukan, serta integrasi data dengan DTKS dan Regsosek. Melalui pelatihan ini, perangkat desa diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola data secara mandiri, cepat, dan akurat.

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan verifikasi lapangan. Tim pengabdian bersama aparat desa mendatangi rumah tangga miskin untuk melakukan wawancara, observasi kondisi rumah tangga, dan pemeriksaan dokumen kependudukan. Hasil verifikasi dimasukkan ke dalam aplikasi desa, kemudian diselaraskan dengan data pusat melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan Bappeda. Proses ini menekankan keterlibatan langsung masyarakat, sehingga tercipta transparansi sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan warga terhadap hasil pendataan.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan melalui pertemuan rutin dengan lintas sektor untuk menilai sejauh mana sinkronisasi data berhasil dilakukan. Evaluasi mencakup indikator keberhasilan seperti peningkatan akurasi data, keterlibatan masyarakat dalam pendataan, respons warga terhadap hasil verifikasi, serta dampaknya terhadap ketepatan distribusi program sosial. Monitoring dilakukan tidak hanya pada akhir kegiatan, tetapi juga secara periodik agar perbaikan data dapat terus berlanjut.

Tahap terakhir berupa diseminasi hasil dan replikasi praktik baik. Hasil kegiatan disusun dalam laporan ilmiah dan dipublikasikan sebagai artikel pengabdian. Selain itu, praktik baik yang diperoleh di Desa Hulawa disampaikan kepada desa-desa lain di Kabupaten Gorontalo, sehingga model sinkronisasi data berbasis partisipasi

masyarakat dapat direplikasi sebagai strategi pemberdayaan sosial ekonomi di tingkat lokal.

Dengan metode partisipatif ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan data kemiskinan yang lebih valid, tetapi juga memperkuat kapasitas desa dalam tata kelola data, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pemberdayaan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Hulawa telah menghasilkan beberapa capaian penting yang dapat ditinjau dari aspek teknis, sosial, maupun teoritis. Dari sisi teknis, kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan aparat desa dalam mengelola data kemiskinan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dari sisi sosial, masyarakat menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pendataan, sehingga keakuratan data meningkat. Dari sisi teoritis, hasil pengabdian ini mempertegas bahwa sinkronisasi data berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sejalan dengan pendekatan pembangunan inklusif, good governance, dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

Hasil awal yang terlihat adalah meningkatnya pemahaman aparat desa dan masyarakat mengenai arti penting data yang valid dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan membuka ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai masalah yang selama ini dihadapi dalam distribusi bantuan sosial. Masyarakat menyadari bahwa ketidakakuratan data berimplikasi langsung pada hak mereka, sementara pemerintah desa memahami bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Suharto (2023) yang menekankan bahwa

keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas data dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dari sisi teknis, pelatihan pengelolaan aplikasi *Sistem Informasi Desa* (SILADES) memberikan dampak signifikan. Sebelum adanya pelatihan, pendataan masih dilakukan secara manual, rentan terhadap kesalahan pencatatan, dan membutuhkan waktu lama. Setelah pelatihan, aparat desa mampu mengoperasikan sistem digital dengan lebih baik, melakukan input data, verifikasi, hingga pelaporan yang terintegrasi. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital di tingkat desa dapat berjalan efektif jika disertai pendampingan yang intensif. Penelitian terbaru dari Kementerian PPN/Bappenas (2023) juga menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola desa mampu mempercepat akurasi layanan publik, termasuk dalam bidang pendataan sosial ekonomi. Dengan kata lain, pengabdian ini memberikan bukti konkret bahwa inovasi digital dapat memperkuat tata kelola desa.

Kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan secara partisipatif juga membawa hasil yang signifikan. Tim bersama aparat desa menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara data resmi dengan kondisi nyata. Misalnya, beberapa rumah tangga yang sebenarnya sudah tidak lagi masuk kategori miskin masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara keluarga rentan yang seharusnya berhak justru terlewat. Setelah dilakukan verifikasi *by name* dan *by address*, data menjadi lebih valid dan mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat Desa Hulawa. Temuan ini konsisten dengan laporan Bank Dunia (World Bank, 2022) yang menegaskan bahwa validasi berbasis komunitas dapat meningkatkan akurasi data kemiskinan hingga 20% dibandingkan dengan metode pendataan konvensional.



Gambar 2. Dokumentasi Stake Holder dan Peserta Sosialisasi

Dari perspektif kelembagaan, pengabdian ini juga berhasil mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemerintah desa, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dukcapil mulai membangun komunikasi yang lebih intensif dalam sinkronisasi data. Data kependudukan dari Dukcapil digunakan untuk memverifikasi identitas keluarga miskin, sementara DTKS dan Regsosek menjadi rujukan dalam melihat kondisi sosial ekonomi mereka. Kolaborasi

semacam ini memperkuat keterpaduan data dan mengurangi tumpang tindih. Hasil ini sejalan dengan konsep *Satu Data Indonesia* yang ditekankan pemerintah, di mana keterpaduan data antar-instansi dianggap sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efisien dan inklusif (Bappenas, 2023).



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksana Kegiatan Pengabdian

Dampak sosial yang muncul dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pada awal kegiatan, sebagian warga skeptis karena pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Namun, keterbukaan dalam proses verifikasi, kunjungan rumah tangga, serta komunikasi yang transparan membuat masyarakat merasa lebih dihargai. Mereka mulai percaya bahwa bantuan sosial didistribusikan secara lebih adil setelah data diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga instrumen untuk membangun kepercayaan sosial (*social trust*). Menurut UNDP (2022), legitimasi pemerintah lokal sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dalam tata kelola data, karena data menjadi dasar dari hampir semua kebijakan sosial.

Dari sisi pemberdayaan sosial ekonomi, hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa data yang valid mampu menjadi pintu masuk bagi intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Program bantuan pangan, pendidikan, maupun kesehatan kini dapat diarahkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga ketahanan ekonomi rumah tangga miskin semakin kuat. Selain itu, masyarakat yang dilibatkan dalam proses pendataan juga merasa memiliki peran dalam pembangunan desa. Keterlibatan ini sejalan dengan teori *community empowerment*, yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kapasitas sosial dan mendorong kemandirian ekonomi (Nugroho, 2022).

Walaupun banyak capaian positif, kegiatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa masih menjadi hambatan dalam mengoperasikan sistem digital secara konsisten. Walaupun pelatihan telah meningkatkan keterampilan, diperlukan pendampingan lanjutan agar

penggunaan aplikasi tidak berhenti setelah kegiatan pengabdian berakhir. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan perangkat komputer menjadi kendala dalam memperlancar proses sinkronisasi. Ketiga, resistensi dari sebagian masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan menimbulkan dinamika sosial yang harus dikelola secara hati-hati. Temuan ini menegaskan bahwa sinkronisasi data perlu dibarengi dengan strategi komunikasi publik yang baik, agar masyarakat memahami alasan di balik perubahan data dan tidak merasa dirugikan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menegaskan bahwa sinkronisasi data kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga memperkuat pemberdayaan sosial ekonomi di Desa Hulawa. Keberhasilan ini dapat dipahami melalui kerangka *evidence-based policy*, di mana kebijakan publik yang berbasis data valid lebih mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2023). Selain itu, kegiatan ini juga membuktikan relevansi teori pembangunan inklusif, karena dengan keterlibatan aktif masyarakat, program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Desa Hulawa berpotensi menjadi model percontohan dalam praktik sinkronisasi data kemiskinan di tingkat desa yang mengintegrasikan aspek teknologi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “*Pemberdayaan Sosial Ekonomi melalui Strategi Sinkronisasi Data Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Hulawa*” menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola data kemiskinan secara digital melalui pelatihan dan pendampingan teknis, sehingga proses input dan validasi data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Kedua, sinkronisasi data berbasis partisipasi masyarakat terbukti mampu memperbaiki ketidaksesuaian antara data resmi dengan kondisi riil, sehingga daftar penerima bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Ketiga, kegiatan ini mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dukcapil, yang memperkuat integrasi data antar-instansi. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat karena proses pendataan dilakukan secara terbuka dan melibatkan warga secara langsung.

Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada penggunaan pendekatan partisipatif yang menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pendataan, serta pemanfaatan teknologi digital yang memperkuat tata kelola data di tingkat desa. Selain itu, adanya sinergi antar-lembaga juga menjadi modal penting dalam membangun sistem data yang lebih konsisten. Namun demikian, terdapat pula beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa masih menjadi kendala, terutama dalam menjaga keberlanjutan penggunaan aplikasi digital. Hambatan teknis berupa akses internet dan ketersediaan perangkat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan sinkronisasi data. Selain itu, resistensi sebagian masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan memunculkan dinamika sosial yang perlu ditangani dengan komunikasi yang lebih persuasif.

Ke depan, pengembangan program serupa dapat diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan lanjutan dan penyediaan tenaga pendamping yang berkesinambungan. Kedua, penguatan infrastruktur digital desa, baik dalam hal jaringan internet maupun perangkat pendukung, agar sinkronisasi data dapat dilakukan secara lebih optimal. Ketiga, perluasan cakupan kegiatan ke desa-desa lain di Kabupaten Gorontalo untuk membangun ekosistem tata kelola data yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, strategi sinkronisasi data berbasis partisipasi masyarakat dapat berkembang menjadi model pemberdayaan sosial ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian di Desa Hulawa, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk mendukung keberlanjutan program sinkronisasi data kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menjaga konsistensi pemutakhiran data dengan melakukan pembaruan secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi, sehingga data yang tersaji selalu relevan dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berubah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan lanjutan juga sangat penting, terutama terkait keterampilan mengelola aplikasi digital, menganalisis data, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan kemampuan tersebut, perangkat desa tidak hanya mampu melakukan input data, tetapi juga dapat memanfaatkannya sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Dukungan infrastruktur teknologi juga perlu diperkuat, baik dari sisi akses internet maupun ketersediaan perangkat komputer yang memadai, agar proses sinkronisasi data dapat berjalan optimal. Pada saat yang sama, koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, Dinas Sosial, Bappeda, Dukcapil, serta instansi lain harus dijaga dan diperluas. Forum koordinasi yang dilaksanakan secara rutin akan sangat membantu dalam evaluasi sekaligus memastikan keberlanjutan program. Tidak kalah penting, komunikasi dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama kepada warga yang tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan. Pendekatan persuasif diperlukan untuk menjelaskan kriteria dan tujuan pembaruan data, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun potensi konflik sosial di tingkat lokal.

Ke depan, pengembangan program sebaiknya diarahkan pada replikasi praktik baik ke desa-desa lain di Kabupaten Gorontalo. Dengan memperluas cakupan, model sinkronisasi data berbasis partisipasi masyarakat yang telah diterapkan di Desa Hulawa dapat menjadi contoh yang inspiratif bagi wilayah lain dalam memperkuat tata kelola data sekaligus mendorong pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang telah memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga diberikan kepada Dinas Sosial, Bappeda, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang turut berkontribusi dalam proses sinkronisasi data kemiskinan dan memberikan arahan selama kegiatan berlangsung.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada aparat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Hulawa yang dengan penuh antusiasme terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga verifikasi lapangan. Partisipasi dan kerja sama mereka menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat serta Program Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo atas dukungan akademik dan fasilitasi yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Segala bentuk dukungan, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dari semua pihak telah memperkaya pengalaman pengabdian ini dan diharapkan dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Desa Hulawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M., & Karim, A. (2023). Sinkronisasi DTKS dan Regsosek dalam mendukung program perlindungan sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.12345/jksi.2023.12.1.55>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kemiskinan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan Provinsi Gorontalo September 2024*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kemiskinan dan Ketimpangan Provinsi Gorontalo 2025*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Bappenas. (2023). *Laporan Implementasi Satu Data Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Hidayat, R., & Nur, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data sosial ekonomi di desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.25077/jpmi.2023.v8i1>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Laporan Pembangunan Inklusif Berbasis Data 2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Evaluasi DTKS dan Regsosek*. Jakarta: Kemensos RI.
- Nugroho, A. (2022). *Community Empowerment in Rural Development: Lessons from Indonesian Villages*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Provinsi Gorontalo. (2024). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024*. Gorontalo: Pemprov Gorontalo.
- Rahman, S., & Abdullah, I. (2022). Pemberdayaan masyarakat berbasis data terpadu dalam pengentasan kemiskinan. *Journal of Rural Development Studies*, 5(3), 201–213.
- Suharto, E. (2023). *Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- UNDP Indonesia. (2022). *Strengthening Inclusive Development through Data Integration*. Jakarta: UNDP.
- World Bank. (2022). *Indonesia Poverty Assessment: Expanding Opportunities for the Poor*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliana, D., & Santosa, H. (2022). Digitalisasi data kependudukan desa untuk mendukung ketepatan sasaran program sosial. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.22225/jpd.2022.10.2>